



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana  
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat  
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. 647/Menhut-II/2009  
Tanggal 15 Oktober 2009  
Luas : ± 195.420 Ha  
Tanggal Penilaian : 06 – 16 Desember 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (07 Januari 2014 s/d 06 Januari 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 11 Januari 2018

  
**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT PAPUA SATYA KENCANA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)  
Joko Doso Suwarso (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunarjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Papua Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.647/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : 195.420 Ha  
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Soho Central 88 Blok D No. 578, Jl. Trembesi, Pademangan – Jakarta Utara  
Komplek Sogun Hills No. 18 – 19, Jalan Raya Esos Esa, Manokwari, Papua Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus : Komisaris : Haryono Winarta  
Direktur : Andi Pramono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-011
- h. Masa berlaku S-PHPL : 7 Januari 2014 s.d 6 Januari 2019

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 Desember 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
	7 Desember 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI di Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XVI di Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
	15 Desember 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI di Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XVI di Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	9 Desember 2017 Base Camp PT Papua Satya Kencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-4 di PT Papua Satya Kencana</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 13 Desember 2017 Base Camp PT Papua	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Satya Kencana dan Lapangan	
Pertemuan Penutupan	13 Desember 2017 Base Camp PT Papua Satya Kencana	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	04 Januari Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Papua Satya Kencana dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Perkembangan kelengkapan dan keabsyahan dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir; SK IUPHHK-HA No. SK.647/Menhut-II/2009, 15 Oktober 2009 luas ± 195.420 hektar berlaku 45 tahun sejak tanggal ditetapkan tidak ada perubahan. Terdapat perubahan kepemilikan saham dan susunan pengurus perusahaan berdasarkan Akta nomor 92 tanggal 13 oktober 2017 dan sudah melapor ke KemenLHK. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah sesuai dengan tingkat realisasinya yang belum temu gelang dan terdapat kelengkapan administrasi yang menunjukkan upaya menyelesaikan batas sampai temu gelang berupa arsip bukti pengeluaran biaya serta telah memiliki arsip SK pedoman tata batas (Rencana Penataan Batas) Nomor 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas PT Papua Satya Kencana baru mencapai 129.027 meter (37,48%) dari rencana sepanjang 344.236 meter terdiri dari batas yang sudah ada sebelumnya 47.885 meter sesuai TBT 799/1993, 45.774 meter sesuai TBT 753/1993 dan BATBF HP dan HPK tahun 2011 sepanjang 35.368 meter.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja PT Papua Satya Kencana berbatasan dengan IUPHHK-HA dan IUP Perkebunan dalam satu tahun terakhir berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas dan informasi dari BPHP, BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, diketahui pada seluruh segmen trayek batas areal kerja tidak pernah ada konflik. Kondisi eksistensi batas konsesi dilapangan sesuai hasil uji petik ada pemeliharaan dan rambu jelas. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya, pemilik izin telah mengetahui terbentuknya KPHP Teluk Bintuni dan siap berkoordinasi dan bersinergi dengan dalam program kerja KPHP.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan KHP Papua Barat diketahui pada sebagian areal kerja sesuai lampiran SK terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain seluas ± 2.861,7 Ha. yang perlu disesuaikan dalam dokumen perencanaan. PT Papua Satya Kencana perlu melakukan juga overly dengan peta indikatif PIAPS dan TORA terlebih dahulu untuk memastikan ada tidaknya areal kerja yang termasuk dalam peta indikatif tersebut untuk bahan tambahan materi penyesuaian Revisi RKU Periode 2012-2021.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Didalam areal kerja PT Papua Satya Kencana terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan IPPKH sektor pertambangan PT Petro Papua Mogoi Wasian (KSO dari Pertamina) yang saat ini kondisi kegiatannya pasif, dalam satu tahun terakhir terdapat aktifitas pengguna kawasan untuk sektor transportasi, berupa kegiatan pembangunan jalan yang turut memanfaatkan sebagian ruas jalan main road PT Papua Satya Kencana tapi belum diketahui informasi legalitas dan panjang mainroad yang terpakai maka bagian perencanaan perlu segera melakukan identifikasi dan hasilnya dilaporkan ke Dirjen. PHPL.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur dan satu kesatuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dalam SK persetujuan RKU, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal dilingkungan karyawan dan kepada masyarakat setempat Kampung Meryep, Kampung Krumasje, Kampung Mososna, Kampung Masyeta, Kampung Otuwajid, Kampung Meridey, Kampung Messi, Kampung Mogoy, Kampung Inggof, Kampung Merdey, Kampung Tasumana, Kampung Jom, Kampung Timofro, Kampung Meyado, Kampung Koibur dan Kampung Wasian dibuktikan dengan dokumen Berita Acara, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Visi misi PT Papua Satya Kencana secara kongkrit dijabarkan dalam sasaran strategis RKU 2012-2021 halaman I-4, sebanyak 18 point. penerbitan RKT 2017 merupakan realisasi tahun ke 6, berdasarkan hasil reviewnya lokasi RKT merupakan CO dari RKT 2016, penerbitan selanjutnya perlu mengurangi CO secara bertahap pada pelaksanaan RKT berjalan atau merevisi RKU. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemilik izin telah menyusun SOP yang dalam implementasinya masih sangat perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Pemenuhan kewajiban mempekerjakan GANIS-PHPL sesuai luas areal kerja berdasarkan SK IUPHHK-HA, diketahui PT Papua Satya Kencana baru merealisasikan sebesar 29,63%, menurut jumlah minimal sesuai ketentuan Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Verifier 1.3.2.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Peningkatan kompetensi SDM		merencanakan training GANIS-PHPL sesuai kekurangannya sebanyak 19 personil terdiri dari GANIS-PHPL CANHUT kurang 5 dari minimal 6 orang, GANIS-PHPL NENHUT kurang 3 dari minimal 4 orang, GANIS-PHPL-BINHUT kurang 7 dari minimal 8 orang dan GANIS-PHPL PKB-R kurang 4 dari minimal 8 orang. Sebelumnya pemilik izin bias dalam meningkatkan persen kinerja pemenuhan SDM khusus (GANIS-PHPL) dengan pelatihan teknis pendukung hingga tidak fokus penambahan GANIS-PHPL tahun 2017, terdapat bukti perbaikan untuk tahun 2018 agar menjadi prioritas dalam undangan Diklat. setelah menyampaikan laporan evaluasi ke BPHP Wil. XVIII Manokwari.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Papua Satya Kencana dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenagakerjaan Disnaker. Kab. Bintuni, Hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3 dan Jaminan Kesehatan BPJS. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja pemilik izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki strauktur organisasi terbaru pengesahan direksi, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL, Jobdescription bagian perencanaan dan produksi perlu ditambahkan ketentuan uraian jabatan sesuai perkembangan peraturan kehutanan tentang SI PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment dengan resiko tanggung jawab tenaga pelaksana/operator yang dikontrol oleh stakeholder yang memiliki hak akses.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi, dlam kaitannya dengan perangkat lunak dari kemen LHK terbukti telah mengimplementasikan Cruissing data pohon, SIPUHH dan E-Monev s.d. bulan November 2017, sedangkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		selanjutnya menurut informasi dari pemilik izin akan segera mengimplementasikan SI-PT dan SI-GANIS PHPL.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Papua Satya Kencana memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasinya. Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan oleh tim SPI perlu memastikan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL oleh penanggung jawab secara struktural telah dilaksanakan sesuai standar PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2017 terdapat 10 jenis temuan, berdasarkan dokumen monev. yang dibuat perusahaan disebut Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi atas seluruh jenis temuan. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruhnya serta terdapat rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan bidang perencanaan, binhut., produksi, sosial, keuangan dan HRD.
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2017 mencakup Hak Ulayat (HU); HU kayu Penebangan , HU Sarparas (Jalan, Camp, Persemaian) , HU logpond , Bantuan Biaya (Honor) , Giliran menjadi Desa Binaan dan Lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat kampung Mogoi Baru dan Membera.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Program CSR PT Papua Satya Kencana tahun 2016 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar 65% dari masyarakat binaan, hal ini terdampak dari nihilnya produksi kayu pada tahun 2016.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT Papua Satya Kencana tahun 2016 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar 68,5% dari masyarakat binaan, hal ini terdampak dari nihilnya produksi kayu pada tahun 2016.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung		kerja PT Papua Satya Kencana baru mencapai persetujuan 60,87% dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 12 kampung masyarakat setempat didalam dan sekitar areal kerja yang berpeluang memiliki akses pada lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, maka pemilik izin perlu menambahkan sebanyak 11 persetujuan dari kampung lainnya.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasi penataan areal kerja di lapangan khususnya blok RKT Tahun 2017 yang direncanakan sebagai Blok 2016 dalam RKT 2016. Maka dari itu posisinya tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK-HA karena terjadi pergeseran Blok RKT. Akan tetapi hal ini masih diizinkan sesuai dengan Perdirjen BUK nomor P.9/VI-BUHA/2014
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan menandaan batas blok dan petak RKT Tahun 2017, seluruh sampling uji petik di lapangan terlihat jelas
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Papua Satya Kencana sudah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP pada seluruh PUP dan sudah melakukan analisis data riap
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah berupaya menganalisa data potensi hasil ITSP dalam penentuan JTT, begitu juga dengan data riap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan pertumbuhan tegakan.		tegakan terdapat bukti adanya pengukuran dan analisa namun belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Papua Satya Kencana telah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan sebagian besar SOP sistem silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) di PT Papua Satya Kencana kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17-24 batang/Ha),
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di dalam areal hutan PT Papua Satya Kencana masih terdapat permudaan tingkat tiang di atas 100 batang tiang/ha, jumlah tersebut diasumsikan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ketiga
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	<b>Kesimpulan</b> Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PT Papua Satya Kencana telah membuat SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon di PT Papua Satya Kencana $\leq 15\%$ , namun pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal hanya sebatas pada pohon inti, perusahaan belum mengamati tingkat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kerusakan permudaan, selain itu terdapat kerusakan yang tingkat tiang dan pohon pada Petak X.14 RKT 2017 yang relatif besar
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Papua Satya Kencana di atas 70%
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat dokumen RKT Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun hanya sebagian (> 50%) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat peta kerja RKT Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan blok tebangan dan kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan peta kerja penandaan pada batas blok tebangan dan areal dipanen, dimanfaatkan, ditanam, dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis RKT Tahun 2016 dan 2017 di PT Papua Satya Kencana kurang dari 70% dari rencana tebangan, Saat Penilaian -4, realisasi tebangan RKT 2017 sudah terealisasi namun belum di LHP-kan.
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Buruk</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Papua Satya Kencana Tahun 2016 kurang sehat karena solvabilitasnya kurang dari 100% serta rentabilitasnya negatif, tetapi catatan akuntan publik wajar
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan	Buruk	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan PT Papua Satya Kencana kurang dari

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		59%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi biaya untuk pengelolaan hutan PT Papua Satya Kencana tahun 2016 di atas 50%,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT Papua Satya Kencana berjalan lancar, namun masih terdapat rencana blok RKT 2016 yang menjadi RKT tahun 2017
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Pencapaian modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan terealisasi 60%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan kegiatan penanaman dengan kualitas tegakan antara 60% – 80%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan hasil deliniasi terhadap areal dengan kelerengan > 40% telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai 3.461 Ha, KPPN 710 Ha, DPSL 800 Ha dan Kelerengan > 40% 518 Ha, sehingga luas total kawasan lindung adalah 5.489 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Penataan Kawasan Lindung PT Papua Satya Kencana Tahun 2017 telah mencapai 79,29%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 753 Path/Row 106/061 liputan tanggal 11 April 2016 dan Citra Landsat 8 ETM+ Band 753 Path/Row 105/061 liputan tanggal 6 Mei 2016 mencakup 89,60% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT tahun berjalan. Sosialisasi kawasan lindung telah mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		12 desa binaan dari 17 desa yang berada di sekitar areal IUPHHK-HA, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 70,59%.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL dan laporan lainnya tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Papua Satya Kencana, yaitu belum mencakup kawasan lindung lereng > 40%
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan aktivitas peladang berpindah, perambah hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan satwa, dan hama penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana dan prasarana pencegahan, sarana dan prasarana pemadaman serta sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebanyak 62,5% yang telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi secara kualifikasi belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum tersedianya bukti-bukti pernah mengikuti training terkait tenaga Satuan Pengamanan dan Satuan Pemadam Kebakaran.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada
<b>Indikator 3.3.</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Papua satya Kencana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, debit aliran permukaan dan pemantauan kualitas air, termasuk tersedia SOP tentang pengamatan pemadatan tanah dan SOP Pengelolaan Limbah B3 di workshop/bengkel
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP, yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi sesuai dengan ketentuan. Dari struktur organisasi memperlihatkan bahwa jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara langsung hanya 2 orang saja.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 60%.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu pemantauan erosi dan pemantauan naik turun air sungai sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru mencapai 50%.
Verifier 3.3.6.	Sedang	Indikasi terjadinya dampak yang besar dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dampak terhadap tanah dan air.		penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Papua Satya Kencana untuk mengelola dampak yang ditimbulkan tersebut.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nepenthes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang mencakup jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi kegiatan inventarisasi belum mencakup inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis flora dan fauna di dalam kawasan lindung sempadan sungai
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau langka, langka, terancam punah dan endemik,
Verifier 3.5.3.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di sempadan sungai Jagiro yang berdekatan dengan Kampung Meredey masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat perladangan walaupun dalam skala yang kecil tetapi hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
<b>Verifier 3.6.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
<b>Verifier 3.6.2.</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisas, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan.
<b>Verifier 3.6.3.</b> Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada, yaitu adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		maupun dari luar kampung. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT Papua Satya Kencana. Dokumen tersedia lengkap berupa dokumen: RKUPHHK, AMDAL, RKTUPHHK 2017, RO, RKAP, identifikasi pemilik ulayat RKT 2017, identifikasi perladangan, dll
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Di PT Papua Satya Kencana tersedia mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik berupa pedoman tatabatas, dan SOP. Namun penataan batas kawasan belum selesai dan setiap PAK selalu berhadapan dengan masyarakat adat Hak Ulayat, sehingga masih terdapat potensi konflik terkait batas hak ulayat
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Papua Satya Kencana tersedia secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen lainnya seperti dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Papua Satya Kencana
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Luas dan batas areal kerja PT Papua Satya Kencana dengan kawasan masyarakat sebagian dapat dibuktikan, berupa: batas kawasan yang belum temu gelang, sebagian batas Hak Ulayat untuk petak yang akan dikerjakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Sementara areal yang belum ada RKT belum teridentifikasi batas hak ulayat nya.
Verifier 4.1.5	Sedang	PT Papua Satya Kencana terbukti telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH		mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari pemerintahan pusat sampai daerah, serta sebagian dari masyarakat setempat tentang luas dan batas (sehingga bisa beroperasi). Masih terdapat potensi konflik terkait Hak Ulayat yang dikuasai oleh masyarakat setempat, sehingga penyusunan kesepakatan dengan masyarakat terkait batas Hak Ulayat berjalan lambat dikarenakan pihak perusahaan harus menjangkau kesepakatan (bersepakat) dengan seluruh individu/farm yang tersebar di dalam dan di luar areal
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RKAP, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, dan E-Monev
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Papua Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat. Terkait jumlah kampung yang cukup banyak (15 kampung di dalam) dan 6 kampung di luar/sekitar, maka berdasarkan bukti pelaksanaan menunjukan bahwa kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat, serta penyusunan dokumennya kurang lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan bukti realisasi berupa Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan (wawancara). Pencapaian realisasi kegiatan PMDH 37,25 %, dan sosialisasi belum menyeluruh
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang	Baik	Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT Papua Satya Kencana terdokumentasi secara lengkap, berupa dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin termasuk ganti rugi.		perencanaan, SOP, Kesepakatan dengan masyarakat, laporan secara periodik, BAP, dokumentasi foto. Kegiatannya berupa PMDH, pembayaran hak ulayat, kegiatan sosialisasi, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kebutuhan camp dari daerah sekitar areal
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data/informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Papua Satya Kencana sebesar 86% ketersediaan seperti data karyawan lokal, monografi desa, dan data penerima bantuan PMDH. Namun monografi kampung definitif yang berlokasi di dalam areal baru sebagian
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana, Laporan Pelaksanaan, dan Monitoring)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RKAP, RO, dan kesepakatan bersama dengan desa
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 36,25 %, yaitu berupa perekrutan tenaga kerja lokal, pembelian pada suplier lokal, dan program PMDH yang terkait peningkatan aktivitas ekonomi/pendapatan masyarakat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>yang handal</b>		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur. Namun referensi/acuan pada SOP tersebut belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru seperti P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik salah satunya masalah kesepakatan ulayat dan fee ulayat. Terdapat peta konflik akan tetapi belum komprehensif dan belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana telah menyiapkan organisasi dan sumberdaya manusia untuk menangani konflik walaupun tidak secara khusus tersedia organisasi resolusi konflik yang melibatkan pihak masyarakat (disepakati), dan rencana pendanaan untuk mengelola konflik tidak nampak walaupun realisasinya dapat ditanggulangi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan sebagian potensi konflik yang terjadi, namun belum tersusun dalam dokumen potensi konflik sosial secara lengkap dan jelas (Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), serta belum ada dokumen identifikasi dan upaya menyelesaikan sebagian potensi konflik lainnya
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Berdasarkan verifikasi, maka Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan sebagian besar (sekitar 85 %) hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Karena sebagian kecil lainnya belum tersedia (tidak tersedia sarana/ruang klinik beserta tenaga medinya, diklat eksternal belum terealisasi, dan kendaraan operasional perlu ditambah)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan	Sedang	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana telah menyusun rencana pengembangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kompetensi tenaga kerja		kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal. Namun pada Tahun 2017 baru sebagian besar yang terealisasi (60%)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan, SOP, dan Surat Keputusan Direksi PT Papua Satya Kencana No.003/PASKA-DIR/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Ketentuan Promosi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, keahlian karyawan (beserta lampiran form persyaratan). Seluruh tahapan dalam pelaksanaan jenjang karir/promosi telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Unit Manajemen IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar telah diimplementasikan yaitu 93,75 %, dan tidak ada sarana kesehatan (ruang) klinik beserta paramedisnya, serta kendaraan operasional kurang memadai
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen izin SK IUPHHK-HA No 647/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat, beserta peta lampiran. Areal kerja PT Papua Satya Kencana sesuai SK IUPHHK berada pada fungsi kawasan yaitu HP, HPT
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran IUPHHK-HA pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan RI untuk areal seluas 195.420 Ha
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu izin tambang PT Petro Papua Mogoi Wasian (sebagai mitra usaha Pertamina) serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		beberapa kampung yang telah dilakukan identifikasi
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021 Nomor : SK.34/BUHA-2/2012 dan RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017 secara <i>self approval</i> dan telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran peta
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA 2016/ CO 2015 dan 2017 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat bukti implementasi di lapangan yang dibuat sesuai prosedur
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016/CO 2015 dan 2017 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya kencana dan posisi blok dan petak tebangan yang digambarkan pada peta terdapat kesesuaian dengan posisi koordinat dilapangan serta telah diimplementasikan penataan blok dan petak dengan baik
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Papua Satya kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012 dilengkapi lampiran-lampiran peta skala 1 : 100.000 serta telah disusun sesuai peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan	Tidak dilakukan	PT Papua Satya kencana dalam pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	penilaian/ NA	alam tidak untuk kegiatan untuk kesiapan pembangunan HTI
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Belum dapat dilakukan penilaian	<p>a. Bahwa selama periode penilaian Desember 2016 s/d November 2017 <b>belum terdapat dokumen LHP yang disahkan/LHP nihil</b> oleh pejabat (Ganis PHPL-PKB ) yang sah sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Pemeriksaan kayu bulat pada TPK hutan dan TPK antara serta di TPn (hasil produksi blok RKT 2017) telah sesuai dengan data kayu bulat pada Laporan Hasil Produksi (LHP sisa stock RKT 2014/2015) dan buku ukur (produksi RKT 2017) . Berdasarkan hasil uji petik fisik kayu masih terdapat kesesuaian</p> <p>c. Hasil uji petik telusur nomor batang/lacak balak yang berasal dengan dokumen buku ukur (bukan dokumen LHP) membuktikan seluruh nomor yang dicek dapat ditemukan dan sesuai pada tunggak di petak tebangan.</p>
<b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan kayu PT Papua Satya Kencana dari TPK hutan sampai TPK IPKH/Industri telah disertai dokumen SKSHHK yang dilengkapi lampiran DKB. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercatat dalam LM-KB/KBS/KBK baik di TPK Hutan maupun TPK Antara terdapat kesesuaian dengan arsip dokumen angkutan kayu SKSHHK
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2016 /CO 2015 dan 2017 telah diberi label sesuai PUHH yang di atur di dalam Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2) dan telah dilakukan penandaan dengan label merah (ITSP), cat, label pengukuran dan label ID Barcode warna kuning pada bontos kayu bulat
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah menerapkan identitas kayu Nomor pohon, petak, jenis, rata-rata diameter, panjang dan blok tebangan yang datanya dimuat pada cat putih, label plastik warna kuning (hasil pengukuran) dan merah (ITSP) dan label kuning ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penandaan identitas kayu telah diterapkan secara konsisten dan mampu telusur sampai di petak tebangan
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen angkutan kayu yaitu arsip dokumen SKSHHK beserta lampiran-lampirannya berupa DKB
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Belum dapat dilakukan penilaian	Tidak terdapat penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), karena tidak terdapat pengesahan dokumen LHP/realisasi produksi (nihil)
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Belum dapat dilakukan penilaian	Tidak terdapat bukti setor PSDH dan DR karena tidak terdapat realisasi pembayaran PSDH dan DR (hasil produksi nihil)
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Belum dapat dilakukan penilaian	tidak terdapat realisasi pembayaran PSDH dan DR berdasarkan ketentuan/tarif, karena tidak terdapat realisasi produksi (nihil)
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dipunyainya dokumen PKAPT yang sah dengan Nomor: 528/UPP/PKAPT/11/2013 tertanggal 16 November 2013 oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan masih berlaku s/d tanggal 14 November 2018
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau bahwa PT Papua Satya Kencana menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional yang dilengkapi dengan dokumen SIB yang sah dari instansi berwenang
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Bahwa seluruh kayu bulat hasil produksi PT Papua Satya kencana telah di terakan tanda V-Legal pada pangkal dan ujung batang sesuai ketentuan dan perjanjian yang telah diatur dalam kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari tentang ijin penggunaan logo tanda V-Legal
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu sesuai SK Gubernur Papua Barat Nmor 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan pada semester II tahun 2016 dan I tahun 2017
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja serta upaya dalam menekan kecelakaan kerja dilapangan
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis dalam Peraturan Perusahaan Bab III dan memorandum yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serta telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2015-2017 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai surat No.Kep 1310/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 12 November 2015 dengan masa berlaku masih dalam proses perpanjangan pada instansi berwenang
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dengan jumlah karyawan 104 orang pada bulan November 2017, tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun bekerja sebagai karyawan PT Papua Satya Kencana BC Jogiro

